

PENGUATAN PENANAMAN NILAI DEMOKRASI PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (Studi Pemilihan Ketua Osis SMA Negeri 13 Sinjai)

Khairul Insan

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Mochamat Nurdin

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: khairulinsan46@gmail.com

Muhammad amar

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Korespondensi penulis: khairulinsan46@gmail.com

***Abstract.** This study examines the level of democratic education for high school students/students in understanding democracy through the election of the Student Council Chair at SMA Negeri 13 Sinjai. It is hoped that the results of this study can provide an overview of how high school students understand democracy and at the same time practice it directly through the election of the Student Council Chair at SMA Negeri 13 Sinjai. As for one of the understandings that they get for the first time through PKN Subjects which discusses Democracy itself. What we want to examine here is whether this subject is in line with the implementation of the osis chair election in practice, seen from the understanding of democracy conveyed by Schumpeter regarding procedural democracy. The method used in this study uses a qualitative approach where the informants are related parties from both the Principal, the OSIS Chair Candidates and students randomly. Field findings data were analyzed using the Interactive Analysis Method proposed by Miles and Huberman. Where the results of the processed data will be able to produce a model of democratic education in senior high schools that is in line with the procedural democracy presented by Schumpeter.*

Keywords: Sustainable, Education, and Democracy.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji mengenai tingkat pendidikan demokrasi bagi siswa/pelajar Sekolah Menengah Atas dalam memahami Demokrasi melalui Pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 13 Sinjai. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana siswa sekolah menengah atas itu dalam memahami demokrasi dan sekaligus dipraktekkan langsung melalui Pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 13 Sinjai. Adapun salah satu pemahaman yang meraka dapatkan secara pertama kali melalui Mata Pejaran PKN yang membahas mengenai Demokrasi itu sendiri. Yang ingin diteliti disini apakah sejalan dengan mata pelajaran tersebut dengan pelaksanaan pemilihan ketua osis tersebut secara prakteknya dilihat dari pemahaman demokrasi yang disampaikan oleh Schumpeter mengenai demokrasi procedural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang dijadikan Informan adalah Pihak-Pihak terkait baik dari Kepala Sekolah, para Kandidat Ketua OSIS serta Siswa secara random. Data hasil temuan dilapangan dianalisis dengan Metode Analisis Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dimana hasil data yang diolah nantinya mampu menghasilkan model pendidikan demokrasi yang ada di Sekolah Menengah Atas itu sejalan dengan demokrasi prosedural yang disampaikan oleh Schumpeter..

Kata kunci: penguatan, pendidikan, dan demokrasi.

Received April 30, 2022; Revised Mei 2, 2022; Juni 22, 2022

*Corresponding author, e-mail address

LATAR BELAKANG

Munculnya gelombang reformasi di Indonesia pada akhir 1990-an membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Euforia politik yang kebablasan dan kadang mengatasnamakan demokrasi menggambarkan bahwa Indonesia belum siap untuk menerapkan demokrasi. Demokrasi yang ada sekarang ini seolah cenderung “dipaksakan”. Di beberapa negara yang sudah dan berhasil menerapkan demokrasi, merupakan negara yang di topang oleh citizenship yang memadai.

Bagi Indonesia yang sedang berjalan menuju demokrasi, peran dunia pendidikan semakin penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan civic culture menunjukkan upaya yang sistematis dan integralistik agar generasi muda yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan dapat benar-benar “mengalami proses demokrasi” dengan menjadi tahu dan sadar tentang pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyangga, memelihara, dan melestarikan demokrasi. Oleh karenanya untuk menumbuhkan civic culture di perlukan upaya perumusan metode dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi di lembaga pendidikan di Indonesia secara sistematis. Salah satu peluang dalam mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia ialah melalui sekolah menengah atas. Karena pada jenjang inilah, upaya strategis untuk menyemaikan demokrasi bisa terwujud.

Implementasi demokrasi dalam suatu negara sangat memerlukan sikap demokratis dari setiap warga negaranya, apalagi di negara yang plural seperti Indonesia ini, yang Oleh karena itu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sikap demokratis dalam berbagai kehidupan. Untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia saat ini terdapat berbagai tantangan seperti yang telah di paparkan diatas. Tantangan tersebut harus segera diatasi oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu elit politik, akademisi, praktisi, dan siapapun juga yang percaya bahwa demokrasi adalah cara yang terbaik untuk indonesia. Upaya dan strategi untuk mengatasi tantangan itu salah satunya melalui pendidikan khususnya pendidikan demokrasi. Salah satu tempat yang strategis untuk menanamkan sikap demokratis adalah di lingkungan sekolah.

Pendidikan demokrasi harus di mulai dari ranah pendidikan formal mulai sejak dini. Berdiskusi dalam forum OSIS merupakan salah satu bentuk latihan berdemokrasi, dimana siswa yang telah terpilih menjadi anggota OSIS untuk masa jabatan tertentu bertemu untuk memperbincangkan suatu permasalahan dengan siswa lain, dari situlah siswa belajar untuk bersikap menghargai perbedaan pendapat, toleransi terhadap orang lain, musyawarah yang sehat dan jujur, menyampaikan pendapat yang santun, saling mempercayai dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Sederhana memang, tetapi dengan melihat terjadinya kericuhan, lontaran kata-kata kotor wakil rakyat saat bersidang di senayan menjadi sangat sulit menemukan orang yang mempunyai etika dalam bermusyawarah.

KAJIAN TEORITIS

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dan sekaligus berfungsi menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi kepada warganegara sejak dini, dengan begitu generasi muda memiliki sikap demokratis, Desain pendidikan demokrasi tidak semata-mata hanya pada ranah kognitif saja, tetapi haruslah sampai pada tingkat implementasi nilai-nilai demokrasi, sehingga siswa terlatih untuk menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dalam setiap aktifitas hidupnya. salah satu sebab lambatnya proses demokrasi di indonesia adalah karena selama ini pendidikan demokrasi disekolah terlalu mengkognitifkan nilai-nilai demokrasi, sehingga siswa sudah merasa cukup ketika mengetahui apa itu demokrasi dan menjadi tidak berkewajiban bagaimana menerapkan demokrasi dalam hidupnya. Ketidakmampuan guru menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didiknya, dimana guru sebatas menysar pada aspek kognitif siswa saja, hanya akan menghasilkan siswa yang miskin nurani, warganegara yang demokratis merupakan tujuan dari diselenggarakanya pendidikan itu sendiri di indonesia (UU No.20 Th 2003).Secara khusus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester 1 tidak membahas tentang demokrasi secara spesifik namun memberikan gambaran mengenai pembahasan keberagaman lewat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Ini yang perlu di lihat apakah yang ada dalam buku pelajaran itu mampu dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata mengenai pemahaman demokrasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yang berjudul Penguatan Penanaman Nilai Demokrasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (Studi pada Pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 13 Sinjai). Penelitian ini di maksudkan untuk mendiskripsikan bagaimana penanaman nilai demokrasi melalui Pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Atas dalam Hal ini dilihat dari Proses Pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 13 Sinjai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kami fokus pada batasan meneliti outcome dari nilai internalisasi demokrasi pada pelajar SMAN 13 Kabupaten Sinjai, yang meliputi perilaku, pemahaman, dan perubahan sikap siswa dalam berdemokrasi. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada beberapa siswa-siswi SMAN 13 Sinjai, yang meliputi panitia pemilu OSIS, Pengurus OSIS, dan siswa-siswi dari kelas X, XI, dan XII yang tidak terlibat dalam kepengurusan OSIS. kami memperoleh data bagaimana mereka melakukan praktik demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem electoral.

Menurut MPK sebagai panitia pelaksana pemilu OSIS yang dilaksanakan pada bulan September 2018, sistematisa penyaringan dimulai dari open recruitment dengan meyosialisasikan pendaftaran pemilihan pengurus OSIS, kemudian membuka pendaftaran yang ditujukan bagi semua siswa-siswi yang diberi kebebasan untuk memilih posisi jabatan yang mereka inginkan. Setelah itu diadakan tes tertulis dan yang lolos akan mengikuti interview tahap 1 yaitu oleh pengurus OSIS dan alumni, jika lolos lagi akan melalui interview tahap 2 oleh Guru. Setelah terpilih 5 besar, kandidat ketua OSIS harus melaksanakan orasi didepan warga sekolah, untuk kemudian dilaksanakan pemilu. Ketua OSIS terpilih mempunyai hak prerogratif untuk memilih pengurus yang lain, dengan tetap memprioritaskan 4 kandidat yang lain dan mempertimbangkan kapabilitas masing-masing calon pengurus.

Alasan mereka menggunakan sistem pemilihan dengan model tersebut adalah mengikuti pola yang telah dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya. Kami mencermati

sistem elektoral yang dilaksanakan sudah sangat terbuka dan lekat dengan sistem demokrasi. Namun, sistem pendaftaran yang dibuka bagi seluruh siswa-siswi dan memberi kebebasan mereka untuk memilih posisi sesuai keinginannya, cara seperti ini pada akhirnya terlihat siswa-siswi cenderung tidak ingin memilih jabatan sebagai ketua OSIS dan mereka lebih tertarik untuk duduk di seksi bidang untuk memenuhi kebutuhan pengalaman organisasi. Tapi yang menarik, di SMAN 13 Sinjai ini, Guru dan karyawan Sekolah juga dilibatkan dalam pemilu. Ada 10 seksi bidang di OSIS, seksi Keagamaan, seksi Tanti Upacara, seksi Olahraga, seksi Tim Olimpiade, seksi Organisasi & Humas, seksi Rumah Tangga & Prasarana, seksi Kesehatan, seksi Kesenian, seksi TIK (Teknologi, Informasi & Komunikasi), dan seksi Komunikasi (koordinator bahasa).

Pemilihan tim MPK yang berjumlah 3 orang, pada awal rekrutmen melalui proses yang sama dengan rekrutmen pada pemilihan pengurus OSIS. Namun, pada tahap interview, kandidat hanya diinterview oleh guru dan hanya guru yang berhak memutuskan untuk memilih tim MPK.

Dari hasil wawancara kami dengan siswa-siswi kelas X, XI, dan XII yang tidak terlibat di kepengurusan OSIS tentang pengamalan nilai-nilai pembelajaran demokrasi yang telah mereka pelajari, pelajaran teori demokrasi yang telah mereka dapat sangat berpengaruh dengan sikap mereka ketika menjalankan praktik-praktik berdemokrasi, mereka semua sangat memahami demokrasi dalam sistem elektoral. Bagi kelas X yang belum terlalu mendalami teori demokrasi, sejauh penilaian mereka pelaksanaan pemilu OSIS sudah sangat demokratis, karena pemilu OSIS dilaksanakan secara terbuka mulai dari sistem open rekrutmen hingga sistem pemilihan.

Tapi bagi kelas XI dan XII yang sudah belajar teori demokrasi secara terperinci, bekal yang mereka dapatkan didalam kelas, dirasa sangat berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi dalam keseharian mereka dilihat dari kesadaran penggunaan hak memilih dan dipilih secara terbuka, adanya fungsi legislasi yang dijalankan MPK dan merupakan pembagian kekuasaan yang sejajar. Tapi dengan jujur mereka mengakui tidak terlalu tertarik mempelajari pelajaran PKn termasuk demokrasi, karena mereka lebih memilih untuk mempelajari sendiri cukup dengan sekali baca buku dan mengikuti perkembangan demokrasi dari berita di media.

Ini menunjukkan kepada kita bahwa lebih banyak dari mereka bahwa pemahaman mereka lebih banyak didapatkan dari media dan sesuatu yang mereka lihat, dalam hal ini apa yang dipraktekkan oleh Politisi melalui pemilihan Anggota DPR dan DPRD. Terkadang pemahaman yang bersifat pragmatis dari para politisi ini mempengaruhi pemahaman mereka tentang arti demokrasi. Pemilihan Ketua OSIS sebagai elemen untuk mengukur tingkat sejauhmana demokrasi yang terbangun dalam cara pandang siswa SMU belum juga mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam tingkat partisipasi

Dari proses pemahaman yang mereka dapat melalui pendidikan formal yang tertera dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang arti demokrasi masih belum menunjukkan hal yang memuaskan. Pada prinsipnya apa yang siswa pahami dalam berdemokrasi dengan mendapatkan pendidikan demokrasi dalam bentuk riilnya adalah dengan mengikuti proses election para pengurus OSIS sebagaimana yang dikemukakan oleh Schumpeter dan diperkuat dengan pendapatnya Robert Dahl tentang adanya partisipasi dalam proses aktualisasi pemahaman demokrasi. Aspek kognitif dari pembelajaran PPKn ini belum mampu memberikan inspirasi dalam proses pemahaman arti demokrasi, sedangkan aspek afektifnya mereka mampu mengidentifikasi bagaimana proses demokrasi itu berjalan, dan aspek evaluatifnya bagaimana mereka mampu mengimplementasikan dan mengoreksi artian demokrasi yang mereka pahami dalam praktek dilingkungan sekitar mereka.

Kontribusi media dalam proses pendidikan politik bagi bangsa sangatlah besar, terutama bagi siswa SMU yang memang sementara lagi belajar apa yang dimaksud dengan demokrasi yang senantiasa mereka dengar terus menerus. Politik media sangat berpengaruh dalam membangun kerangka pemikiran siswa tentang arti demokrasi, karena dari siswa yang kami interview memberikan keterangan bahwa pemahaman demokrasi mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pemberitaan dan tayangan media, sehingga konstruksi berpikir mereka mengenai demokrasi sebatas apa yang ditampilkan oleh para politisi dan pengamat memberikan argumentasi dalam setiap tayangan dan artikel yang mereka sampaikan.

Jadi pelaksanaan Pemilihan OSIS merupakan salah satu bentuk instrumen untuk mengetahui bagaimana siswa memahami demokrasi secara procedural ternyata tidak

memberikan kontribusi pemahaman secara hakiki, melainkan hanya partisipasi yang menunjukkan keharusan/kewajiban mereka, bukan partisipasi yang menunjukkan hak mereka sebagai warga negara. Jadi apa yang disampaikan oleh Schumpeter tentang demokrasi procedural tersebut tidak dapat dibuktikan dalam penelitian kami ini, yang paling penting dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi yaitu melalui proses sosialisasi politik, dengan tiga aspek pendidikan yaitu; kognitif, afektif dan evaluative sebagaimana yang disampaikan oleh Gabriel Almond. Dimana dalam mengkonstruksi pemikiran daripada siswa haruslah dapat melibatkan environment (lingkungan) dalam menafsirkan pemahaman mereka tentang demokrasi serta membebaskan mereka untuk mencari tahu pemahaman yang lain selain apa yang berdasar pada kurikulum proses pendidikan formal sebagaimana yang disampaikan oleh Paulo Friere.

Pengertian Dan Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi.

Pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh dan untuk rakyat menjadi prinsip dasar pengertian demokrasi. Hal ini dengan di cirikan bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan. Budaya demokrasi merupakan perwujudan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa atau Negara diyakini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang demokratis. Prinsip Demokrasi yang berlaku secara universal mengadopsi dari internasional commission of jurist dalam konferensi di Bangkok pada tahun 1965, bahwa syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah “rule of law” mencakup perlindungan konstitusi, badan kehakiman yang independent, pemilihan umum yang bebas dan tidak memihak, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan pendidikan kewarganegaraan.

A. Pengertian dan Ciri-ciri masyarakat madani

Masyarakat madani disamakan dengan civil society, dimana masyarakat madani atau civil society adalah perwujudan masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, rasional, berkeadilan sosial dan sejahtera, masyarakat madani juga mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai

persoalan sosial. Masyarakat madani dicirikan lahir secara mandiri dibentuk oleh masyarakat sendiri tanpa campur tangan Negara, Keanggotaan bersifat sukarela atas kesadaran masing-masing anggota, Mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya) tidak bergantung bantuan pemerintah (Waren dan Lyon, 1983 dalam modul pembelajaran MGMP untuk SMA, 2006).

B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia di bagi bagi dalam beberapa kurun waktu yaitu awal kemerdekaan, masa orde lama (1945-1965), orde baru (1965-1998) dan reformasi (1998-sekarang). ketiga kurun waktu demokrasi Indonesia di bingkai dengan demokrasi pancasila, yaitu demokrasi yang didasari pada nilai-nilai pancasila yang didasari prinsip musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Ketiga masa kurun waktu tadi tidak dijelaskan bagaimana perkembangan demokrasi itu berlangsung, disini malah menjelaskan keadaan sistem ketatanegaraan indonesia, pemberlakuan konstitusi di Indonesia, system pemerintahan Indonesia, dan amandemen UUD 1945 pada periode reformasi, hal ini justru tidak berbeda dengan pelajaran sejarah.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

Di Lingkungan keluarga :

1. Seluruh anggota keluarga merasa berarti atau berperanan.
2. Anggota keluarga ikut bertanggung jawab terhadap keputusan bersama.
3. Tidak ada anggota keluarga yang merasa ditinggalkan
4. Semangat kekeluargaan kebersamaan semaksimal kokoh.

Di lingkungan sekolah :

1. Menyusun tata tertib bersama
2. Menyusun kelompok piket kelas
3. Memilih ketua OSIS, ketua kelas

Di Lingkungan Masyarakat :

1. Pemilihan ketua RT
2. Musyawarah yang menyangkut kepentingan bersama, seperti program pembangunan masyarakat dan lingkungan.

Di Lingkungan Negara :

1. Terlibat dalam pemilihan umum
2. Melalui wakil kita terlibat dalam penyusunan Undang-undang
3. Melakukan pengawasan baik terhadap wakil rakyat maupun pemerintah melalui media massa.

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan, terutama untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maka dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penilaian. Dimana tujuan dilakukannya penilaian adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dan berhasil tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan oleh para pengajar dan siswa. Terutama untuk perubahan-perubahan perilaku siswa yang diharapkan melalui proses belajar. Secara umum, dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdapat 3 ranah yang diharapkan mampu dikuasai oleh siswa sebagai hasil belajar. Ketiga ranah tersebut adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penilaian ketiga ranah tersebut, aspek yang terdapat dalam masing-masing ranah penilaian tentu berbeda-beda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendidikan demokrasi tidak hanya didapat dari sekolah semata, melainkan dapat dari berbagai media yang ada terutama media elektronik sangat berpengaruh dalam pemahaman siswa tentang arti demokrasi. Jadi untuk mengukur pemahaman siswa dengan berjalannya pelaksanaan pemilihan OSIS di SMA Negeri 13 Sinjai, dengan partisipasi dari semua elemen siswa baik itu siswa sebagai panitia pemilihan, siswa dalam posisi sebagai pemilih dan siswa yang berposisi untuk dipilih, secara umum mereka bisa dikatakan paham dengan demokrasi dalam tataran penerapannya dalam sebuah pemilu. Ini bisa dilihat dari semangat panitia penyelenggara dalam merumuskan sebuah mekanisme atau aturan main yang se-fair

mungkin yang nantinya bisa diterima semua pihak, antusiasme siswa yang tinggi untuk menduduki jabatan sebagai pengurus OSIS, dalam Peran pendidikan demokrasi lewat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dengan segala kelemahannya tidak dipungkiri mempunyai andil yang besar dalam memperkenalkan demokrasi kepada siswa, namun pengetahuan mereka tentang demokrasi tidak semata-mata mereka dapat dari bangku sekolah saja, keluarga, lingkungan, dan media (massa khususnya televisi) juga memberikan pengaruh tentang pemahaman demokrasi bagi mereka. Serta pelaksanaan Pemilihan OSIS merupakan salah satu bentuk instrumen untuk mengetahui bagaimana siswa memahami demokrasi secara procedural ternyata tidak memberikan kontribusi pemahaman secara hakiki, melainkan hanya partisipasi yang menunjukkan keharusan/kewajiban mereka, bukan partisipasi yang menunjukkan hak mereka sebagai warga negara.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz bin Muhammad, Alu Abd. Latif, (Departemen Agama Saudi Arabia 1422 H)
- Abu Ahmad, Nurbaeti, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Bineka Cipta, 1991) Bachtiar, Metodologi Penelitian (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) Chairul Mahfud, Pendidikan Multikultural, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Dahlan Al-Bahri, Kamus Modern Bahasa Indonesi, (Yogyakarta: Arkola), 1994 Dahl, Robert, Perihal Demokrasi, Demos, Yogyakarta, 1998
- M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I Statistik Deskriptif, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h. 17
- Rahman Getteng, Pendidikan Islam Dalam Pembangunan Moral, Remaja Wanita Pembangunan (Ujung Pandang Yayasan Al-Ahkam 1977), h. 11
- Sanjaya, Wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standa Proses Pendidikan, (Jakarta, Kencana Prinata Media Group, 2002)
- Senapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sugiono, Statistik, untuk Penelitian, (Jakarta, Alfabeta, 2009)
- Undang-Undang RI, No. 12 tahun 2012, Pendidikan Tinggi, (Bandung: Citra Umbara, 2012)